

CISDI Bersama Masyarakat Sipil Dorong Penerapan Cukai MBDK sebesar 20 Persen untuk Turunkan Konsumsi Hingga 17,5 Persen

Rangkuman rekomendasi CISDI:

1. Memprioritaskan penerapan cukai MBDK pada 2023
2. Menerapkan cukai MBDK sebesar 20% yang diestimasi akan efektif menurunkan konsumsi MBDK hingga 17,5%
3. Menerapkan besaran cukai MBDK berdasarkan besaran volume (*volumetric*) dan/atau kandungan gula pada produk
4. Mengenakan cukai pada produk MBDK secara komprehensif, baik ke produk MBDK berpemanis gula maupun berpemanis buatan serta produk MBDK olahan dan siap saji.

Jakarta, 29 November 2022 – Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mengadvokasikan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) untuk menekan konsumsinya dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Usulan ini didukung lebih dari 13.000 penandatanganan petisi dari masyarakat luas dan 21 organisasi masyarakat sipil. Hal ini disampaikan CISDI dalam peluncuran riset terbarunya "**Elastisitas Harga Permintaan Minuman Berpemanis dalam Kemasan di Indonesia**" di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (29/11).

"Berdasarkan hasil studi elastisitas harga permintaan yang kami lakukan, kami mengestimasi penerapan cukai MBDK sebesar 20% akan menurunkan permintaan masyarakat rata-rata hingga 17,5%," ujar **Prof. Agus Widarjono, M.A., Ph.D selaku anggota tim peneliti dari CISDI.**

Riset elastisitas harga permintaan ini menyatakan rata-rata besaran nilai elastisitas produk MBDK yang diteliti adalah -1,09. Artinya, kenaikan rata-rata harga MBDK sebesar 1% akan diikuti penurunan permintaan produk MBDK rata-rata sebesar 1,09%.

"Kami juga merekomendasikan pengenaan cukai secara volumetric dan/atau berdasarkan kandungan gula karena berdasarkan penelitian ini, keduanya sama-sama efektif dalam mengurangi permintaan produk MBDK dan memaksimalkan pemasukan negara," Agus menambahkan.

Pembatasan MBDK harus menjadi perhatian pemerintah karena data menunjukkan bahwa konsumsinya telah meningkat hingga 15 kali lipat, dari sekitar 51 juta liter (1996) menjadi



780 juta liter (2014), jauh melebihi pertumbuhan jumlah populasi yang meningkat 0,3 kali lipat dari 200 juta ke 255 juta pada periode yang sama.

“Penerapan cukai MBDK akan menjaga masyarakat dari konsumsi MBDK berlebih dan mengurangi beban biaya kesehatan sebagai akibat obesitas dan PTM,” ujar Agus.

Sebagai catatan, konsumsi MBDK berlebih memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan resiko obesitas serta PTM. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan persentase penduduk Indonesia yang mengalami obesitas meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, dari 10,5% pada 2007 menjadi 21,8% pada 2018. Sementara itu tren peningkatan juga terjadi pada prevalensi PTM di Indonesia seperti diabetes, hipertensi, stroke dan gagal ginjal kronis. Saat ini, PTM tercatat sebagai tujuh dari sepuluh penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

“Cukai ini perlu diterapkan secara komprehensif dan serentak ke semua produk MBDK, baik yang berpemanis gula maupun berpemanis buatan, serta produk olahan dan siap saji. Ini akan mencegah masyarakat mengalihkan konsumsinya ke produk MBDK lain yang tidak terkena cukai,” ujar **Olivia Herlinda, Chief of Policy and Research CISDI**.

Masyarakat pun mendukung kebijakan cukai MBDK. Ini terlihat dari dukungan 13.000 orang di petisi [“Diabetes dan Obesitas Mengintai: Lindungi Masyarakat dari Bahaya Minuman Berpemanis”](#) serta surat dukungan dari 21 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Food Policy. Pada kesempatan yang sama, petisi dan surat dukungan ini disampaikan kepada perwakilan pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Riset ini menunjukkan bahwa cukai akan efektif mengurangi konsumsi MBDK di masyarakat. Ini seharusnya menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk memprioritaskan penyusunan teknis regulasi penerapan cukai MBDK pada 2023. Apalagi rencana cukai MBDK ini juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat,” ujar **Shita Dewi, peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM)**, selaku perwakilan dari Koalisi Food Policy.

-SELESAI-



Tentang CISDI

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi non-profit yang bertujuan memajukan pembangunan sektor Kesehatan dan penguatan sistem Kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi dan intervensi inovatif yang inklusif dan partisipatif.

Melalui program Food Policy, CISDI turut serta dalam pencegahan penyakit tidak menular. Program ini bertujuan menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang berkaitan erat dengan kemunculan diabetes dan obesitas, dua penyakit mematikan di Indonesia, melalui metode riset ilmiah, advokasi kepada pembuat kebijakan, pelibatan komunitas dan anak muda, serta meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat melalui beragam kegiatan kampanye.

Tentang Koalisi Food Policy

Koalisi Food Policy adalah koalisi sejumlah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan, kepemudaan, dan/atau kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Beberapa organisasi yang menjadi anggota adalah Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Warga Kota (FAKTA), dan Persatuan Diabetes (Persadia) Muda.

Informasi lebih lanjut

Ardiani Hanifa Audwina

Communications Officer

+62 821 2177 8668

Email: communication@cisdi.org

www.cisdi.org